

**Momen Puncak Hari Keluarga Nasional 2024: Deputi Advokasi Penggerak Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Sebut Tantangan Stunting Masih Nyata**



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Suasana-hari-Momen-Puncak-Hari-Keluarga-Nasional-Harganas1.jpg>

Momen Puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2024 ditandai dengan peluncuran Population Clock atau alat untuk menginformasikan data kependudukan secara real time, dan pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah dan figur pembantu terbaik dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI di Qin Hotel Banjarbaru, Selasa (22/7/2024).

Acara itu dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., dan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, serta para bupati dan wali kota penerima penghargaan.

Kepada pers, Deputi Adpin BKKBN RI menyampaikan, tantangan terbesar di bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan KB adalah masih tingginya prevalensi stunting, sebagai salah satu indikator pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Stunting memang harus kita atasi bersama, mengingat dampaknya yang serius dimasa depan. Selain aspek kesehatan, kualitas juga akan menurunkan produktivitas," ujarnya.

Secara nasional, meskipun tahun 2023 penurunannya kecil, namun dia tetap bersyukur bahwa upaya penurunan stunting menunjukkan tren positif. "Kita masih memiliki waktu untuk mencapai target penurunan 14 persen di tahun 2024. Oleh karena

itu, berbagai terobosan yang sudah dilaksanakan di Kalimantan Selatan agar terus ditingkatkan. Pada bulan juni yang lalu, kita telah melaksanakan Pengukuran dan intervensi serentak di Posyandu untuk PPS. Potret Kalimantan Selatan selama gerakan intervensi serentak, sebanyak: dari sasaran jumlah Balita 283.839 (Data EPPGBM), sebanyak 279.608 yang diukur (98,51 persen). Selanjutnya dari jumlah Balita yang diukur, terdapat 104.276 (37,29 persen) Balita bermasalah gizi, dan 1,85 % atau 1.933 balita yang dilakukan intervensi," urainya.

Di kalsel, masih ada peningkatan 0,1 persen dan ini perlu ditangani sehingga Stunting bisa ditekan. "Maka fokus dalam waktu yang singkat tahun ini, selain dilakukan intervensi/pendampingan terhadap Calon pengantin, Bumil, dan Balita. Kami mohon balita-balita bermasalah gizi (sebagaimana data hasil intervensi serentak Posyandu di atas), dilakukan Intervensi baik spesifik (ASI, PMT) maupun sensitif (penyediaan air bersih, sanitasi, KB)," ujarnya.

Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejauh ini melaksanakan program Germas Cinta Banua. Program ini berupaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku anak usia sekolah terhadap budaya hidup sehat. sehingga diharapkan dapat tumbuh sebagai pemuda-pemudi usia produktif yang kuat, sehat, dan berdaya saing.

Selain itu, menjawab tantangan yang ada di sektor stunting, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan terus menggalakkan intervensi pencegahan stunting yang dimulai sejak prenatal, masa kehamilan, dan masa 1.000 hari pertama kehidupan. "Upaya pencegahan tersebut kami lakukan dengan melibatkan mitra strategis dan kolaborasi lintas sektor," tandas Roy.

Nah, momentum Harganas ini, lanjut dia, perlu dimanfaatkan sebagai daya ungkit dalam pencapaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di indonesia. "Saya mengajak jajaran Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, untuk mensinergikan langkah dengan BKKBN, dalam rangka menuntaskan permasalahan stunting dan mewujudkan keluarga berkualitas menuju indonesia emas," ujarnya.

Adapun Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Nyigit Wudi Amini, S.Sos, M.Sc, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang menyukseskan acara hari Puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2024 dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah, bupati, dan wali kota yang mendapat penghargaan.

Pada acara tersebut, selain ada peluncuran Population Clock atau alat untuk menginformasikan data kependudukan secara real time, dan pemberian penghargaan kepada kepala daerah, acara diisi hiburan madihin dan ditutup dengan doa.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Provinsi Kalimantan Selatan digelar di Ballrom Qin Hotel, Banjarbaru, Senin (22/7/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Deputi Advokasi Penggerak Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Sukaryo Teguh Santoso.

Dalam momen ini, ia menyampaikan angka stunting di Kalimantan Selatan berada pada angka 21,5 % dan mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,01%.

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/22/momen-puncak-harganas-2024-deputi-adpin-bkkbn-ri-sebut-tantangan-stunting-masih-nyata>, Momen Puncak Hari Keluarga Nasional 2024: Deputi Advokasi Penggerak Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Sebut Tantangan Stunting Masih Nyata, (22/07/2024).
2. <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/235319/peringatan-harganas-ke-31-provinsi-kalsel-terungkap-angka-stunting-kalsel-215-persen>, Peringatan Hari Keluarga Nasiona ke-31 Provinsi Kalimantan Selatan, Terungkap Angka Stunting Kalimantan Selatan 21,5 Persen, (22/07/2024).

### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:**

1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 2 ayat 1)

4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a. menurunkan prevalensi Stunting;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
6. Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
  - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
7. Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
  - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

- Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2))